BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Objek Penelitian

4.1.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Majalengka

Kabupaten Majalengka merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat, memiliki luas 1.204,24 Km2 atau 3,25% dari luas wilayah daratan Provinsi Jawa Barat (37.095,28 Km2). Secara geografis Kabupaten Majalengka, Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Indramayu; Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Cirebon dan Kuningan, Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya; Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Sumedang.

Secara geografis Kabupaten Majalengka berada di bagian Timur Provinsi Jawa Barat, dengan posisi astronomis : Bagian Barat antara 108° 03’-108° 19’ Bujur Timur, bagian Timur antara 108° 12’-108° 25’ Bujur Timur, bagian Utara antara 6° 36’-6° 58’ Lintang Selatan dan bagian Selatan antara 6° 43’-7° 03’ Lintang Selatan. Temperatur rata-rata di Kabupaten Majalengka adalah 26,7°C hingga 29,7°C. Suhu udara maksimum terjadi pada bulan Oktober yaitu 35,4°C, sedangkan suhu udara minimum terjadi pada bulan juni dengan suhu sebesar 22,7°C. Seluruh wilayah Kabupaten Majalengka termasuk ke dalam zona WIB (Waktu Indonesia Barat). Kelembaban di Kabupaten Majalengka sepanjang tahun 2013 berkisar antara 66% – 88%.

Dilihatdari topografinya Kabupaten Majalengka dapat dibagi dalam tiga zona daerah, yaitu :

1. Daerah pegunungan dengan ketinggian 500-857 m diatas permukaan laut dengan luas 482,02 Km² atau 40,03 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten Majalengka.
2. Daerah bergelombang/berbukit dengan ketinggian 50-500 m diatas permukaan laut dengan luas 376,53 Km² atau 31,27 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten Majalengka.
3. Daerah dataran rendah dengan ketinggian 19-50 m diatas permukaan laut dengan luas 345,69 Km² atau 28,70 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten Majalengka.

Tipe iklim di Kabupaten Majalengka termasuk bervariasi, suhu berkisar antara 18,8± 37,0 ºC. Curah hujan rata-rata setahun sekitar 209,84 mm, curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Januari mencapai 530,7 mm dengan hari hujan rata-rata 16 hari per bulan. Namun dalam beberapa dekade, akhir-akhir ini iklim di Kabupaten Majalengka khususnya dan di Indonesia pada umumnya sudah tidak bisa ditentukan lagi waktunya, karena sudah tidak teratur sesuai dengan waktu-waktu yang biasa terjadi. Hal ini karena berbagai faktor alam yang kompleks baik yang disebabkan oleh ulah manusia yang disengaja maupun yangtidak disengaja.

Gambar 4.1

Peta Kabupaten Majalengka



Sumber : Kearsipan Kabupaten Majalengka 2017

Jarak dari Ibu kota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten berkisar antara 0-37 Km,Kecamatan Lemahsugih merupakan daerah terjauh dari Ibukota Kabupaten. Sedangkan jarak dari Ibukota Kabupaten Majalengka ke kabupaten-kabupaten di Seluruh Jawa Barat berkisar antara 46 ± 389 Km. Kecamatan Lemahsugih akan rawan dengan terjadinya musibah bencana tanah longsor dimana dalam kurun waktu 5 bulan terahir sudah terjadi 8 kali musibah longsor dimana banyak rumah warga yang menjadi korban akibat musibah tanah longsor dari total rumah warga di Desa Cisalak Kecamatan Lemahsugih dari 513 rumah , sebanyak 343 rumah diantaranya sudah mengalami retak-retak dan terancam ambruk. Sebanyak 6

rumah warga rusak parah akibat anjlok dan 2 rumah sudah hancur tertimpa tanah longsor.

4.1.1.1 Visi dan Misi Kabupaten Majalengka

Visi Terwujudnya Kabupaten Majalengka yang Religius, Maju dan Sejahtera

Misi

1. Meningkatkan Kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat Majalengka beriman dan bertaqwa
2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan yang Merata dan Terjangkau
3. Mengembangakn Ekonomi Kerakyatan yang berbasis agribisnis
4. Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan umum
5. Optimalisasi Otonomi Desa
6. Meningkatkan infrastuktur yang proporsional, bekualitas dan berkelanjutan
7. Meningkatkan Pemberdayan masyarakat

4.1.2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka

Landasan hukum berdirinya Badan Penanggaulangan Bencana di Kabupaten Majalengka adalah Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) dan Peraturan Daerah No. 34 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia No.

125 Tahun 2004, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 44370 sebagaimana telah beberpa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang No. 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

Sebagai Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah dibentuk dengan berbagai permasalah-permasalahan yang dihadapi seluruh unsur aparat, Dinas Badan Penanngulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka berupaya utnuk dapat melaksanakan tugas pokok dab fungsi sesuai bidang-bidang bagian kesekertariatan Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka sehingga dapat tercapai visi dan misi Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati Kabupaten Majalengka yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Majalengka.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka dibentuk dalam rangka penanggulangan dan mengurangi indeks resiko bencana sesuai dengan kondisi wilayah Kabupaten Majalengka yang terbagi menjadi 2 bagian wilayah yaitu bagian selatan terdiri dari pegunungan dan perbukitan terjal dengan

ketinggian 400-500 meter diatas permukaan laut dan sangat berpotensi terjadinya bencana pergeseran tanah, Sesuai hasil pemetaan Badan Vulkanologi dan Mitigasi Provinsi Jawa Barat. Sedangkan wilayah utara merupakan dataran rendah sangat berpotensi terjadinya banjir, longsor dan abrasi sungai, karena adanya beberapa aliran sungai yang cukup besar serta banyaknya sungai-sungai kecil yang bermuara pada sungai besar.

4.1.2.1 Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka

Visi Terwujudnya Penanggulangan Bencana Secara Cepat, Terpadu dan Terkoordinasi dengan Melibatkan Seluruh Potensi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat. Visi dimaksud mengandung makna bahwa BPBD Kabupaten Majalengka dalam menanggulangi bencana dilakukan secara cepat melalui kegiatan tanggap darurat, terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan partisipasi pemerintah, swasta dan masyarakat

Misi BPBD Kabupaten Majalengka menetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan fasilitas penyiapan dan penyediaan sumber daya sedekat mungkin dengan rawan bencana;
2. Memberikan penjaminan pemenuhan hak masyarakat korban bencana dan pengungsian yang terkena bencana terutama pelayanan kebutuhan dasar;
3. Meningkatkan mobilisasi sumber daya bantuan dari donatur kepada penerima bantuan;

4. Tersalurkannya pemberian bantuan pemenuhan dasar kepada korban bencana secara cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;

5. Terselenggaranya proses pemberian bantuan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditetapkan.

4.1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kabupaten Majalengka

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majalengka mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

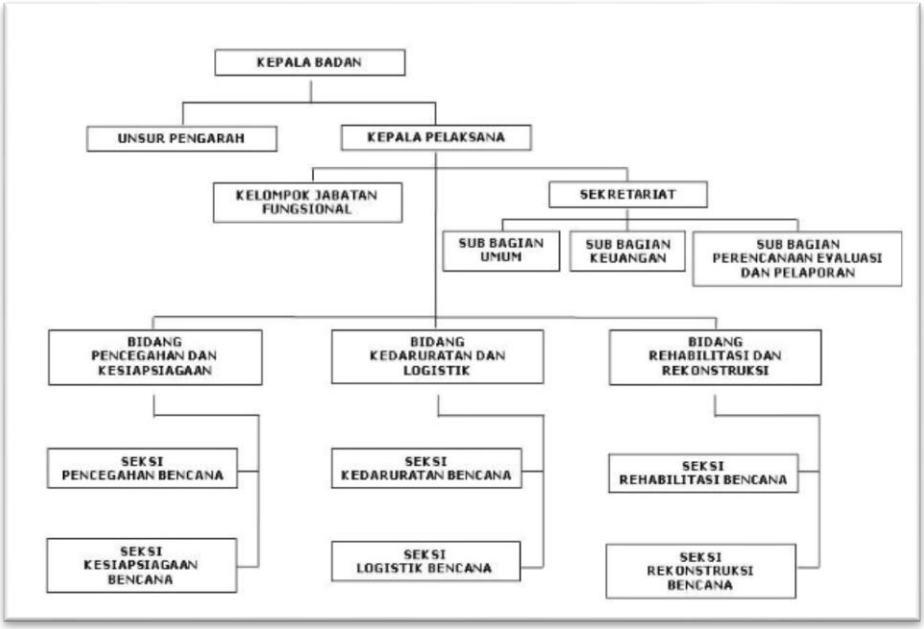
1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan yang mencakup pencegahan bencana, penanganan bencana, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Tugas Pokok, Fungsi, Visi dan Misi tersebut maka BPBD Kabupaten Majalengka dalam rangka menanggulangi bencana mempunyai tujuan:

1. Meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan aparat terkait dan masyarakat khususnya di daerah rawan bencana dalam mengantisipasi terjadinya bencana dengan melaksanakan kegiatan pemetaan daerah rawan bencana dan sosialisasi kepada masyarakat sehingga apabila terjadi bencana kerugian baik berupa korban jiwa maupun harta benda bisa ditekan sekecil mungkin;
2. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas personil di lapangan dalam upaya penanganan bencana khususnya pada tahap tanggap darurat dan penyaluran logistik;
3. Melaksanakan koordinasi dengan berbagai instansi terkait dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana.

Gambar 4.2
Stuktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka



Sumber : Data Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka 2017

Gambar 4.3 menunjukan struktur organisasi Lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka dimimpin oleh Kepala Dinas dan dibantu oleh jajaran staf dibawahannya. Badan Penanggulangan Bencana Darah Kabupaten Majalengka memiliki tiga bidang tata ruang, bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, dan bidang kedaruratan dan logistik, dan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

4.2 *Output* Terkait Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Majalengka dalam menaggulangi bencana lonsor

Output adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik atau pun non fisik. Suatu kegiatan yang berupa fisik maupun non fisik yang diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kelompok keluaran (output) meliputi dua hal. Pertama, kualitas pelayanan yang diberikan, indikator ini mengukur kuantitas fisik pelayanan. Kedua, kuantitas pelayanan yang diberikan yang memenuhi persyaratan kualitas tertentu. Indikator ini mengukur kuantitas fisik pelayanan yang memenuhi uji kualitas.

Output merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik (sarana dan prasarana) atau pun non fisik (pelatihan). Badan Penanggulangan Badan Daerah Kabupaten Majalengka. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majalengka. Output/keluaran merupakan sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari sutau kegitan yang berupa fisik (saran dan prasarana) atau pun non fisik. Sarana dan prasarana dapat berbeda sesuai lingkup dan penggunaannya, misalkan sarana dan prasarana pendidikan berbeda dengan transportasi, wisata dan sebagainya, namun memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana..

Output dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka adalah Kualitas pelayanan yang baik yang diberikan kepada

masyarakat terkait penanggulangan bencana longsor yang terjadi di Desa Cisalak Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka tercermin dari pertama transparasi, yaitu pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti, kedua akuntabilitas yaitu pelayanan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, ketiga kondisional yaitu pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas, keempat partisipatif yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat, kelima kesamaan hak yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan dan status sosial, keenam keseimbangan hak dan kewajiban yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

4.2.1 Kualitas Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Majalengka dalam menanggulangi bencana longsor

Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara masyarakat dengan aparatur BPBD Kabupaten Majalengka atau hal-hal lain yang disediakan oleh BPBD selaku pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk menanggulangi permasalahan longsor di Kabupaten Majalengka, tingkat kualitas pelayanan tidak dapat dinilai berdasarkan sudut pandang perusahaan tetapi harus

dipandang dari sudut pandang penilaian pelanggan. Karena itu, dalam merumuskan strategi dan program pelayanan, perusahaan harus berorientasi kepada masyarakat pelanggan dengan memperhatikan komponen kualitas pelayanan. Kualitas jasa merupakan sesuatu yang dipersepsikan oleh masyarakat. Masyarakat akan menilai kualitas sebuah jasa yang dirasakan berdasarkan apa yang mereka deskripsikan dalam benak mereka. Masyarakat akan merasa kecewa apabila aparatur BPBD tidak dapat memberikan kinerja yang baik. Kualitas yang rendah akan menimbulkan ketidakpuasan pada masyarakat,

Berdasarkan wawancara peneliti di lapangan bahwa pelayanan BPBD Kabupaten Majalengka untuk menanggulangi bencana longsor kurang baik karena respon yang cukup lama untuk menanggulangi longsor yang terjadi di desa cisalak kecamatan lemahsugih kabupaten majalengka sebaiknya BPBD Kabupaten Majalengka bisa cepat tanggap dalam menanggulangi longsor yang terjadi agar masyarakat dapat puas atas pelayanan atau kinerja yang diberikan.

4.2.2 Pelatihan oleh Badan Penanggulangan Bencana di Daerah Kabupaten Majalengka dalam menanggulangi bencana longsor

Pelatihan adalah yang diadakan untuk kesiapsiagaan sudah semakin banyak dilakukan oleh berbagai pihak baik dari lembaga-lembaga tertentu atau pemerintah tujuan dari adanya suatu pelatihan tersebut ialah agar membentuk suatu kemampuan yang profesional dalam menanggulangi bencana. suatu pelatihan terfokus yang menempatkan pelakunya dalam situasi yang

disimulasikan guna menjalankan fungsi yang diharapkan darinya pada saat kejadian sesungguhnya.

Pelatihan adalah langkah-langkah yang dilalui untuk penyelenggaraan latihan, yang meliputi Tahap Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan, dan Evaluasi, tingkat latihan adalah pengelompokan metode latihan berdasarkan tujuan dan sasaran. latihan menjadi tingkat Pelatihan, Simulasi, dan Uji Sistem. Secara umum, dapat dikatakan bahwa Tingkat Pelatihan lebih ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan pelaku; Tingkat Simulasi untuk meningkatkan keterampilan pelaku dan Tingkat Uji Sistem untuk menguji pengetahuan dan keterampilan pelaku dalam menjalankan fungsi yang diharapkan dari pelaku saat terjadinya situasi darurat.

Pelatihan yang diadakan untuk kesiapsiagaan sudah semakin banyak dilakukan oleh berbagai pihak baik dari lembaga-lembaga tertentu atau pemerintah. Tujuan dari adanya suatu pelatihan tersebut ialah agar membentuk suatu kemampuan yang profesional dalam menanggulangi bencana. pelatihan yang biasanya dibuat berdasarkan resiko bencana yang telah dihadapi. Dengan kata lain pelatihan disesuaikan dengan keadaan, resiko serta lokasi dari bencana tersebut. Salah satunya pada pelatihan kesiapsiagaan tentu saja itu salah satu dari aktivitas pelatihan kesiapsiagaan untuk menghadapi suatu bencana longsor.

Pelatihan yang ada harus diikuti oleh seluruh penghuni lokasi yang telah ditentukan, hal tersebut bertujuan agar pada saat kejadian dapat mengantisipasi bencana untuk sementara waktu. Penguni disarankan tidak bersikap panik, karena kepanikan akan membuat nalar serta logika untuk berpikir terhambat. sehingga

pada prinsipnya kesiapsiagaan merupakan sikap antisipasi untuk menanggulangi bencana longsor kejadian yang ada pada lokasi dimanapun kita berda terutama kejadian tergolong bencana**.**

> "Sebagai Kepala pelaksana menurut saya tentunya harus tahu terlebih dahulu bagaimana pelatihan organisasi yang kepala pelaksana dipimpin, seperti kesiapsiagaan meliputi Tahap Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan dalam peanaggulangan bencana longsor oleh pihak bidang kesiapsiaan kepada masyarakat dengan melihat dan mengetahui kebutuhan masyarakat." (Wawancara dengan Kepala Pelaksana BPBD, tanggal 17 Juli 2017)

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa adanya pelatihan organisasi seperti kesiapsiagaan yang meliputi tahapa-tahap yang pertama tahapan perencanaan, tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan dalam penanggulangan bencana longsor oleh pihak bidang kesiapsiagaan.

4.3 Hasil Terkait Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Majalengka dalam menanggulangi bencana longsor

Hasil mengukur pencapaian atau hasil yang terjadi karena pemberian Kinerja Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Hasil pencapaian yang sangat penting agar hasil yang di inginkan tepat sasaran dan pencapaian hasil dan pelaksanaannya.

Proses output dan keluaran yang mengenai Perbup Kabupaten Majalengka Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majalengka. Tujuan yang direncanakan Kabupaten Majalengka dalam penyampaian output dan

keluaran adalah untuk memberikan pengetahuan, pemahaman kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Majalengka. Mudah dimengerti dan mudah dipahami agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah bisa mudah dan paham dari kebijakan tersebut.

Prinsip penanggulangan bencana diatas merupakan acuan kepada Badan Penanggulangan Bencana yang di daerah, sebagaimana wawancara dengan Skertaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka

> "Sekretaris BPBD, A. Mahmud hasil dari kajian geologi tersebut, akan dijadikan sebuah masukan yang nantinya menentukan kebijakan, apakah masyarakat yang terancam itu akan diungsikan atau tidak. Kebijakan BPBD akan memprioritaskan pada pencegahan bencana. Berbicara bencana banyak faktor dan banyak pihak terkait bukan hanyan BPBD,"
> (Wawancara dengan Skertaris BPBD, tanggal 17 Juli 2017)

Berdasarkan pemeparan di atas menurut hasil dari kajian geologi tersebut, akan dijadikan sebuah masukan yang nantinya menentukan kebijakan, apakah masyarakat yang terancam itu akan diungsikan atau tidak. Saya mengajak masyarakat di daerah rawan pergerakan tanah, agar menjaga lingkungannya, supaya meminimalisir bencana terjadi.

4.3.1 Upaya Terkait Penanggulangan yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Majalengka

Mengalami paparan bencana alam secara langsung namun juga yang tidak langsung karena melihat bencana dan dampaknya melalui media televisi atau koran dapat menyebabkan merasakan bencana meskipun tidak seberat yang mengalami langsung. Fokus *psychological first* aid utamanya diberikan kepada individu atau komunitas yang mengalami bencana alam dan berpotensi

mengalami masalah kesehatan fisik ataupun mental. *Psychological first aid* menyasar pada kebutuhan dasar individu yang mengalami kondisi darurat atau trauma antara lain pengurangan bahaya yang memberikan ancaman, meningkatkan rasa kontrol, penyediaan serta pemberian informasi yang dibutuhkan, kebutuhan dasar terpenuhi seperti makanan, minuman, kesehatan, tempat berlindung, dan arah untuk masa depan setelah mengalami bencana.

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan seiap masyarakat di dalam suatu wilayah dan merupakan sesuatu yang penting. Makhluk hidup tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya, meskipun lingkungan bersifat mendukung atau menyokong kehidupan makhluk hidup, namun perlu diingat bahwa tidak semua lingkungan di muka bumi ini memiiki keadaan yang ideal untuk kehidupan mahkluk hidup.

Lingkungan hidup mempunyai keterbatsan, baik dalam hal kulalitas maupun kuantitasinya. Lingkungan hidup dapat mengalami penururan kuallitas dan penurunan kuantitas. Penuruan kualitas dan kuantitas lingkungan ini menyebabkan kondisi lingkungan kurang atau tidak dapat berfungsi lagi untuk mendukung kehidupan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Kerusakan lingkungan hidup dapat disebabkan oleh proses alam karena aktivitas manusia.

Kerusakan lingkungan dapat menyebabkan bencana, salah satunya bencana longsor yang terjadi di desa cisalaka, kecamatan lemahsugih kabupaten majalengka selain akibat faktor alam juga dipengaruhi oleh manusia. Kondisi tersebut tentunya membutuhkan perhatian yang sangat serius dari pihak khususnya pemerintah sebagai lembaga pelayanan publik tentunya harus

melakukan upaya-upaya penanggulangan bencana dalam hal ini bencana longsor perlu penanganan dan penanggulangan yang serius sebab menyangkut jiwa dan harta warga masyarakat sekitar.

BPBD Kabupaten Majalengka sebagai instansi yang khususnya menangani bencana-bencana di desa cilasak kecmatan lemahsugih kabupaten majalengka, dalam penelitian ini fokus dalam penanggulangan bencana longsor di desa cisalak kecamatan lemahsugih kabupaten majalengka. Keberhasilan pelaksanaan penanggulangan bencana longsor di desa cisalak kecamatan lemahsugih kabupaten majalengka sangat ditentukan dengan kegiatan oleh badan penanggulangan bencana daerah.

Menurut data yang peneliti peroleh badan penaggulangan bencana daerah menjelasakan bahwa kegiatan yang dilaksanakan BPBD kabupaten majalengka adalah memberikan bantuan logistik, memberikan karung penahan, saat terjadi longsor BPBD berupaya secepat mungkin untuk melakukan evakuasi, mengamankan harta benda korban bersewadaya membersihkan mataerial longsor dan ikut serta dalam penertiban arus lalu litas yang diahlikan, memberikan sosialisasi pada warga maupun perangkat desa tentang teknik penanggulangan bencana longsor, membuat papan peringatan area bahaya longsor, pemasangan bronjong, drainase dan TPT, pembuatan jembatan darurat sementara, melakukan pendapatan kronologis kejadian dan menilai kerusakan/kerugian.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa upaya BPBD kabupaten majalengka untuk menanggulangi longsor cukup maksimal hal ini di tandai dengan kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD untuk menanggulangi longsor di desa ciasalak kecamatan lemahsugih kabupaten majalengka.

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan seiap masyarakat di dalam suatu wilayah dan merupakan sesuatu yang penting. Mahluk hidup tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya, meskipun lingkungan bersifat mendukung atau menyokong kehidupan makhluk hidup, namun perlu diingat bahwa tidak semua lingkungan di muka bumi ini memiiki keadaan yang ideal untuk kehidupan mahluk hidup.

Lingkungan hidup mempunyai keterbatsan, baik dalam hal kulalitas maupun kuantitasinya. Lingkungan hidup dapat mengalami penururan kuallitas dan penurunan kuantitas. Penuruan kualitas dan kuantitas lingkungan ini menyebabkan kondisi lingkungan kurang atau tidak dapat berfungsi lagi untuk mendukung kehidupan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Kerusakan lingkungan hidup dapat disebabkan oleh proses alam karena aktivitas manusia.

Kerusakan lingkungan dapat menyebabkan bencana, salah satunya bencana longsor yang terjadi di desa cisalaka, kecamatan lemahsugih kabupaten majalengka selain akibat faktor alam juga dipengaruhi oleh manusia. Kondisi tersebut tentunya membutuhkan perhatian yang sangat serius dari pihak khususnya pemerintah sebagai lembaga pelayanan publik tentunya harus melakukan upaya-upaya penanggulangan bencana dalam hal ini bencana longsor perlu penanganan dan penanggulangan yang serius sebab menyangkut jiwa dan harta warga masyarakat sekitar.

BPBD Kabupaten Majalengka sebagai instansi yang khususnya menangani bencana-bencana di desa cilasak kecmatan lemahsugih kabupaten majalengka, dalam penelitian ini fokus dalam penanggulangan bencana longsor di desa cisalak kecamatan lemahsugih kabupaten majalengka. Keberhasilan pelaksanaan penanggulangan bencana longsor di desa cisalak kecamatan lemahsugih kabupaten majalengka sangat ditentukan dengan kegiatan oleh badan penanggulangan bencana daerah.

Menurut data yang peneliti peroleh badan penaggulangan bencana daerah menjelasakan bahwa kegiatan yang dilaksanakan BPBD kabupaten majalengka adalah memberikan bantuan logistik, memberikan karung penahan, saat terjadi longsor BPBD berupaya secepat mungkin untuk melakukan evakuasi, mengamankan harta benda korban bersewadaya membersihkan mataerial longsor dan ikut serta dalam penertiban arus lalu litas yang diahlikan, memberikan sosialisasi pada warga maupun perangkat desa tentang teknik penanggulangan bencana longsor, membuat papan peringatan area bahaya longsor, pemasangan bronjong, drainase dan TPT, pembuatan jembatan darurat sementara, melakukan pendapatan kronologis kejadian dan menilai kerusakan/kerugian.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa upaya BPBD kabupaten majalengka untuk menanggulangi longsor cukup maksimal hal ini di tandai dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD untuk menanggulangi longsor di desa ciasalak kecamatan lemahsugih kabupaten majalengka.

4.4 Kaitan Usaha dengan Pencapaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Majalengka dalam menanggulangi bencana longsor

Kaitan usaha adalah yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat bisa tercapai sesuai dengan pembangunan kesehatan. Ukuran kaitan usaha disini dapat dilihat dari dua sub indikator yaitu ukuran efisiensi yang mengkaitkan usaha dengan keluaran pelayanan. Sehingga usaha BPBD Kabupaten Majalengka harus lebih baik lagi dalam penanggulangan bencana longsor di desa cisalak kecamatan lemahsugih kabupaten majalengka yang daerah rawan bencana.

Ukuran persepsi publik tentang hasil Kerja Badan Penanggulangan Benacana Daerah Kabupaten Majalengka adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan suatu organisasi atau instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi Badan Penanggulangan Benacana Daerah Kabupaten Majalengka terhadap pelayanan kepada masyarakat yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan sebelumnya.

Usaha meningkatkan hasil kerja Badan Penanggulangan Benacana Daerah Kabupaten Majalengka harus dimulai dengan memusatkan perhatian kepada sekelompok masalah yang berkaitan, bencana longsor kemudian perubahan sifat aparatur dalam bekerja dan kebutuhan akan pelayanan pada masyarakat yang lebih baik. Badan Penanggulangan Benacana Daerah Kabupaten Majalengka dalam menangulangi bencana longsor harus memberikan kinerja yang baik pada

penanggualangan. Untuk meningkatkan hasil, kinerja yang berarti harus berusaha mencapai tingkat terbaik.

Berdasarkan pemaparan di atas, menurut peneliti bahwa usaha BPBD Kabupaten Majalengka dalam meannggulangi bencana longsor agar lebih meningkat lagi usaha BPBD Kabupaten Majalengka, daerah rawan bencana longsor di desa cisalak kecamatan lemahsugih kabupaten majalengka. sudah berusaha semaksimal mungkin dari tugas nya masing-masing bahkan ada bantuan dari relawan bencana untuk memperkuat dan usaha dalam menanggulangi bencana longsor.

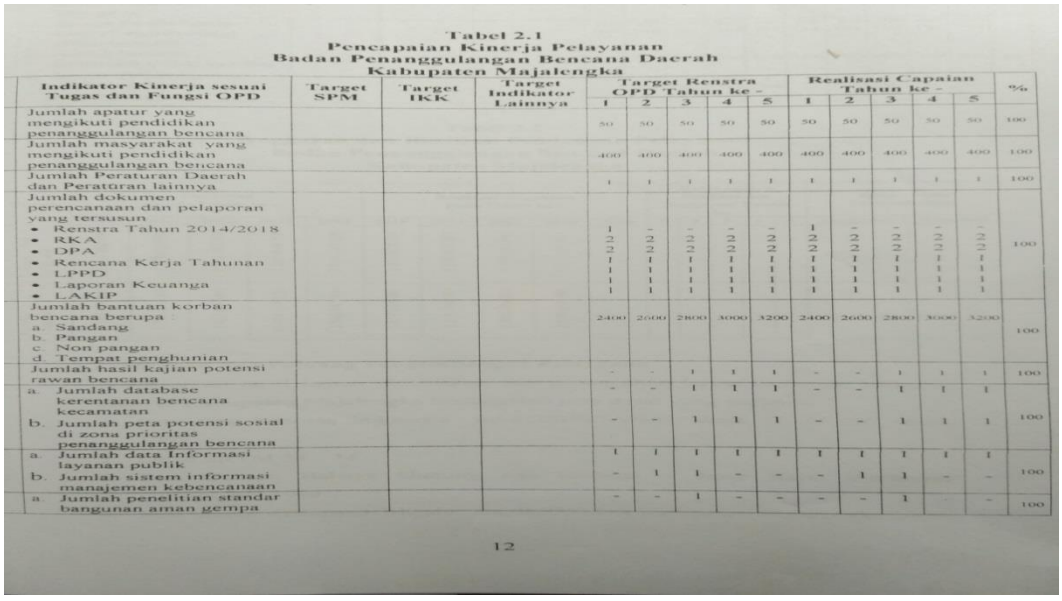
Tingkatan pencapaian mengenai kinerja BPBD di desa cisalak kecamatan lemahsugih kabupaten majalengka dalam menanggulangi bencana longsor dapat dilihat dari hasil kerja BPBD kabupaten majalengka itu sendiri. Hasil kerja sangat penting diketahui oleh instansi pemerintah dalam hal ini BPBD kabupaten majalengka.

> Sifatnya hanya sekedar pencegahaan komando yang ada darurat bpbd punya dana siap siaga diambil dari bidang kesiapsiagaan kaalu tidak bisa ditanggulangi ada Fungsi komando, fungsi kualitasi dan fungsi pelaksanaan, kalau fungsi komando BPBD kepala badan nya sekda oleh sekda bisa memperintahakan komando kalau ada BPBD harus berkoordinasi. (Wawancara tanggal 17 Juli 2017)

Berdasarkan data yang diperoleh di atas sudah berjalan dengan lancar dan pelaksanaan nya siapsiagan kalau ada bencana langsung bergegas pencapaian kinerja Kepala BPBD sekaligus Sekda bisa memperintahkan komando ada di BPBD dan harus berkoordinasi oleh semua aparatur.

Tabel 4.1

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana DaerahKabupaten Majalengka



Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Majalengka

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					%
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
Jumlah apatur yang mengikuti pendidikan penanggulangan bencana				50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100
Jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan penanggulangan bencana				400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	100
Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun														
• Renstra Tahun 2014/2018				1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
• RKA				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100
• DPA				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
• Rencana Kerja Tahunan				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
• LPPD				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
• Laporan Keuanga				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
• LAKIP				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Jumlah bantuan korban bencana berupa														
a. Sandang				2400	2600	2800	3000	3200	2400	2600	2800	3000	3200	100
b. Pangan														
c. Non pangan														
d. Tempat penghunian														
Jumlah hasil kajian potensi rawan bencana				-	-	1	1	1	-	-	1	1	1	100
a. Jumlah database kerentanan bencana kecamatan				-	-	1	1	1	-	-	1	1	1	
b. Jumlah peta potensi sosial di zona prioritas penanggulangan bencana				-	-	1	1	1	-	-	1	1	1	100
a. Jumlah data Informasi layanan publik				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
b. Jumlah sistem informasi manajemen kebencanaan				-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	100
a. Jumlah penelitian standar bangunan aman gempa				-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	100

12

Sumber : BPBD Kabupaten Majalengka

Berdsarkan capaian kinerja Badan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam kurun 3 tahun mulai tahun 2010 s/d tahun 2013 belum mencapai sasaran secara optimal.

4.4.1 Efesiensi Terkait Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Majalengka dalam menanggulangi bencana longsor

Efisiensi adalah pemakaian biaya atau bentuk pengorbanan lainnya dari setiap komponen pada setiap aktivitas usaha yang berjalan secara wajar. Komponen tersebut meliputi biaya, waktu, dan tenaga kerja. efisiensi adalah perbandingan yang negatif antara input dan output. Negatif karena sumber, alat dan tenaga kerja yang dipergunakan lebih kecil dari hasil yang diperoleh.

Efisiensi kerja adalah perbandingan terbaik antara suatu pekerjaan yang dilakukan dengan hasil yang dicapai oleh pekerjaan tersebut sesuai dengan yang ditargetkan baik dalam hal mutu maupuan hasilnya yang meliputi pemakaian waktu yang optimal dan kualitas cara kerja yang maksimal. Efesiensi adalah perbadingan terbaik antara sutau kegiatan dan hasilnya. Menurut definisi minim efesiensi terdiri atas 2 unsur yaitu kegiatan dan hasil tersebut merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untukn mencapai hasil dari kegiatan yang di jalankan.

Untuk menunjukan efisiensi relatif suatu unit jika dibandingkan dengan hasil sebelumnya, tujuan yang ditetapkan secara internal, norma atau standar yang bisa diterima atau hasil yang bisa dihasilkan setara. indikator yang mengaitkan usaha dengan pencapaian, meliputi dua hal. *Pertama* ukuran efisiensi yang mengaitkan usaha dengan keluaran pelayanan, indikator ini mengukur sumber daya yang digunakan atau biaya per unit keluaran, dan memberi informasi tentang keluaran ditingkat tertentu dari penggunaan sumber daya di lingkungan organisasi. *Kedua* ukuran biaya hasil yang menghubungkan usaha dan hasil pelayanan, ukuran ini melaporkan biaya per unit hasil, dan mengaitkan biaya dengan hasil sehingga managemen publik dan masyarakat bisa mengukur nilai pelayanan yang telah diberikan. Berdasarkan wawancara dengan Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka yang menerangkan bahwa : “Dalam efisiensi biaya kami memaksimalkan sumber daya yang ada pada BPBD, namun bilamana mengenai bantuan bencana dalam hal logistik ada anggraan yang sudah ditetapkan” (Wawancara tanggal 17 Juli 2017).

Berdasarkan data yang diperoleh di atas mengenai efisiensi dalam hal pemaksilan sumber daya yang ada pada aparatur, namun bilamana mengenai bantuan bencana mengenai logistik sudah ada anggaran yang ditetapkan serta adanya bantuan dari pihak- pihak terkait pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka dalam hal efisiensi sudah cukup baik dan berjalan dengan sesuai dengan semestinya.

4.4.2 Biaya hasil yang menghubungkan usaha dan hasil pelayan Badan Penanggulangan Bencana

Ukuran biaya hasil yang menghubungkan usaha dan hasil pelayanan, ukuran ini melaporkan biaya per unit hasil, dan mengaitkan biaya dengan hasil sehingga managemen publik dan masyarakat bisa mengukur nilai pelayanan yang telah diberikan. Mengukur sumber daya yang digunakan atau biaya perunit keluaran, dan mamberi informasi tentang keluaran di tingkat tertentu dari pengunaan sumber daya, menunjukan efesisensi relatif suatu unit jika dibandingkan dengan hasil sebelumnya, tujuan yang ditetapkan secara internal, norma atau standar yang bisa diterima atau hasil yang bisa dicapai oleh organisasi yang setara. Biaya merupakan laporan biaya perunit hasil dan kaitan biaya dengan hasil sehingga manajemen publik dan masyarakat bisa mengukur pelyanan yang telah diberikan.

Berikut hasil wawancara dengan pihak aparatur BPBD yang menerangkan mengenai ukuran biaya hasil ukuran yang menghubungkan usaha dan hasil yaitu : pelayanan sampai saat ini selama pelaksanaan kesiapsiagaan BPBD langsung bergerak. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BPBD sampai saat ini

selama pelaksanaan kesiapsigaan dan pencegahaan BPBD langsung bergegass dan bergerak sera membantu masyrakat dalam menanggulangi bencana longsor yang ada di majalengka pihak aparatur sudah siap tanggap dalam pencapain kinerja yang diberikan dalam rangka perlindungan kepada masyarakat yang terkena bencana.

4.5 Informasi penjelas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka dalam menanggulangi bencana longsor

Informasi penjelas merupakan sesuatu infromasi sangat bemanfaat , sehingga dalam proses pelakasanaan kegiatan penanggulangan bencana di desa cisalak kecamatan lemahsugih kabupaten majalengka dapat berjalan dengan lancar dan terkendali, tercapaiannya informasi kepada masyarakat akan dapat mempermudah BPBD Kabupaten Majalengka untuk mengetahui kekurangan dalam penanggulangan bencana longsor serta dapat mengoptimalkan Kinerja BPBD Kabupaten Majalengka. Informasi penjelas adalah suatu informasi yang harus disertakan dalam pelaporan kinerja yang mencangkup infromasi kuantitatif dan naratif, membantu pengguna untuk memahami ukuran kinerja yang dilaporkan, menilai kinerja organisasi, dan mengevaluasi signifikansi faktor yang akan mempengaruhi kinerja yang dilaporkan. informasi kuantitatif berisi masukan nilai yang dapat dihitung seperti maslah berat , jumlah, tekanan, temperatur , dan sebagianya dapat di lakukan sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang belaku umum di dalam suatu parameter. Jika diatas telah dijelaskan tentang pengertian teks deskriptif, sekarang saya bahas tentang pengertian teks naratif.

Teks atau paragraph naratif adalah suatu paragraph atau rangkaian dari beberapa kalimat yang bersifat untuk menguraikan ataupun menjelaskan suatu keadaan. Atau dalam istilah lain teks naratif disebut sebagai suatu prosa yang subjeknya itu berupa suatu rangkaian dari suatu kejadian.

Informasi penjelas dari kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka dalam penanggulangan bencana longsor di kabuptaen majalengka pada dasarnya bertujuan untuk melindungi masyrakat dalam hal penanggulangan bencana yang baik dan efektif. Sehingga kemampuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka dapat lebih ditingkatkan supaya lebih berdaya guna dan berhasil guna yang pada akhirnya pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tanggung jawabnya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Ukuran informasi penjelas disini dapat dilihat dua sub indikator yaitu faktor subtansial merupakan faktor yang ada diluar kontrol organisasi dan faktor yang dapat merupakan kontrol oleh organisasi seperti pengadaan staf. Berdasarkan pemaparan di atas, menurut peneliti bahwa informasi penjelas Badan Penanggulangan Bencana Daerah berjalan dengan lancar dan terkenadali, tercapainya informasi akan dapat mempermudah BPBD Kabupaten Majalengka agar dapat mengoptimalkan bencana longsor di area rawan bencan lonsor.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bidang Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Majalengka bahwa informasi penjelas yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Majalengka sudah dilaksanakan, hal ini terbukti pada pemasangan rambu-rambu rawan bencana longsor di lokasi kejadian, agar

tercegahnya hal – hal yang tidak di inginkan, Berdasarkan uraian di atas peneliti menjelaskan bahwa informasi sudah terselenggaranya kepada masyarkat dengan memasang rambut-rambu rawan bencana longsor agar tidak ada hal yang di inginkan seperti ada korban bencana longsor.

4.5.1 Faktor subtansial terkait Badan Penanggulangan Bencana Daerah menanggulangi bencana longsor

Subtansial merupakan faktor yang ada diluar kontrol organisasi. Substansi yang harus selaras dengan rasa keadailan masyarakat sedang budaya hukumnya harus mendukung tegaknya hukum jika salah satunya timpang, misal struktur aparat (*law unforercement officer*) tidak akuntable, kredible dan capable mustahil hukum bias ditegakkan. Substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem tersebut. Atau dapat dikatakan sebagai suatu hasil nyata, produk yang dihasilkan, yang diterbitkan oleh sistem hukum tersebut. substansi meliputi peraturan-peraturan sesungguhnya, norma dan pola perilaku dari orang-orang di dalam sistem tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas menurut peneliti bahwa substansi yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah berjalan dengan baik, ditandai dengan komunikasi yang baik antara desa dengan BPBD Kabupaten Majalengka terkait bencana longsor yang terjadi di Desa cisalak Kecamatan lemahsugih sehingga bencana longsor langsung cepat ditanggapi. Substansi di dalam BPBD sudah menjadi kewajiban sebagai aparatur untuk melayanai masyarakat pihak BPBD Kabupaten Majalengka apabila ada bencana harus siap siaga kadang kala

tidak mengenal jam kerja harus dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Majalengka dalam penanggulangan bencana karena salah satu tugas BPBD Kabupaten Majalengka agar tidak ada korban mengenai bencana longsor tersebut maka pihak BPBD itu sendiri harus bergegas dalam penanggulangan bencana.

Dalam uraian penjelasan dan pemaparan dari pihak aparatur dalam memberikan kinerjanya dalam hal faktor substansional di BPBD kabupaten Majalengka sudah cukup baik dan berjalan dengan baik itu terlihat dari semua pengukuran kinerja berdasrkan pada SOP yang sudah dijalankan merupakan bentuk tindakan nyata dalam penaggulangan bencana daerah mengenai penangnagan bencana longsor.

4.5.2 Pengadaan Staffterkait Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupataen Majalengka

Staffmerupakan suatu proses untuk menumbuhkan atau meningkatkan suatu potensi fisik dan psikis manusia untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi (lembaga) yang dilakukan dengan cara mendayagunakan manusia sebagai tenaga kerja yang ada di BPBD Kabupaten Majalengka. Dari segi bisnis, staff atau sumber daya manusia (SDM) adalah manusia yang bekerja dalam suatu organisasi. Dalam hal ini disebut juga dengan karyawan. Jika tidak ada manusia yang menjadi sumber daya di perusahaan, maka perusahaan tersebut tidak dapat berjalan dan menghasilkan laba sehingga sumber daya manusia merupakan hal yang paling dibutuhkan oleh BPBD Kabupaten Majalengka.

Staf BPBD Kabupaten Majalengka adalah ujung tombak pelayanan, sangat diandalkan untuk memenuhi standar mutu yang diinginkan oleh wajib pajak dan wajib retribusi. Untuk mencapai standar mutu tersebut, maka harus diciptakan situasi yang mendukung pelayanan yang memuaskan wajib pajak dan wajib retribusi. Upaya-upaya manusia itu bukan sesuatu yang statis, tetapi terus berkembang dan berubah, seirama dengan dinamika kehidupan manusia, yang berlangsung dalam kebersamaan sebagai suatu masyarakat. Oleh karena itu salah satu situasi yang mendukung adalah seluruh peraturan pengelolaan sumber daya manusia yang berdampak pada perlakuan yang sama kepada pegawai. Berdasarkan observasi peneliti di lapangan bahwa staf atau karyawan yang ada di BPBD Kabupaten Majalengka sudah cukup untuk menanggulangi bencana longsor yang ada di Kabupaten Majalengka, dengan merekrut relawan dan mengandalkan staf yang ada. Oleh karena itu diharapkan dapat membantu menyelesaikan penanggulangan longsor di Kabupaten Majalengka Desa Cisalak Kecamatan Lemahsugih, dengan merekrut relawan dan mengandalkan staff yang ada dalam penanggulangan bencana longsor menyangkut hal perlindungan pemerintah terhadap masyarakat yang terkena bencana sudah cukup baik itu ditandai dengan beberapa staff dan relawan yang membantu dalam penaggulangan bencana longsor yang ada di kabupaten Majalengka.